

## Analysis Of The Implementation Of The Responsibility Accounting System In The Ilir Talo Sub-District Seluma District

### Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Kantor Camat Ilir Talo Kabupaten Seluma

Aldino Erinsyah Putra <sup>1)</sup>; Neri Susanti <sup>2)</sup>; Kamelia Astuty <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Management Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

<sup>2)</sup> Department of Management, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [aldieriansyahputra0304@gmail.com](mailto:aldieriansyahputra0304@gmail.com)

#### How to Cite :

Putra, E, A. Susanti, N., Astuty, K. (2023). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Kantor Camat Ilir Talo Kabupaten Seluma. JURNAL EMBA REVIEW, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v3i2>

#### ARTICLE HISTORY

Received [28 Oktober 2023]

Revised [09 Desember 2023]

Accepted [17 Desember 2023]

#### KEYWORDS

District Head's Office,  
Responsibility Accounting

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Dalam melaksanakan organisasi instansi mempunyai kegiatan untuk mendapatkan tujuan yang telah disepakati sebelumnya, Adanya pelimpahan wewenang mengharuskan adanya pertanggung jawaban bawahan kepada atasan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan hal yang penting dalam suatu kantor, termasuk Kantor Camat Ilir Talo Kabupaten Seluma. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban pada Kantor Camat Ilir Talo Kabupaten Seluma. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian salah satu kantor Camat di kabupaten Seluma. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Camat Ilir Talo belum menerapkan keseluruhan akuntansi pertanggungjawaban yang sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban Mulyadi (2018) karena kurangnya pemahaman tentang akuntansi pertanggungjawaban dan hanya ada beberapa item dari indikator akuntansi pertanggungjawaban yang sesuai.

#### ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the implementation of the accountability accounting system at the Ilir Talo sub-district office, Seluma Regency. This research was conducted using a descriptive approach. The research location is one of the sub-district offices in Seluma Regency. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, documentation. The results of the research show that the Ilir Talo Subdistrict Office has not implemented responsibility accounting that is in accordance with Mulyadi's responsibility accounting due to a lack of understanding of responsibility accounting, there are only a few items that are appropriate.

## PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan organisasi instansi mempunyai kegiatan untuk mendapatkan tujuan yang telah disepakati sebelumnya, dalam suatu organisasi mendapatkan pengaruh lingkungan, perkembangan dan persaingan antara organisasi yang semakin ketat akan berdampak terhadap

organisasi dalam mencapai tujuan tersebut, oleh sebab itu setiap perusahaan akan mengelola semua kegiatan operasinya dengan lebih efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut harus terlebih dahulu mencapai laba bersih yang maksimal, maka salah satu hal perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah pengawasan yang sebaik-baiknya atas biaya terutama yang berkaitan dalam proses produksi. Dalam perusahaan yang besar, pimpinan tidak lagi mengandalkan kemampuan dirinya untuk membuat rencana dalam melaksanakan kegiatan organisasi untuk mengendalikan rencana yang telah disusun, sehingga instansi dapat mendelegasikan dan memiliki wewenang kepada manajer lain dengan menggunakan sistem formal. Sistem ini membantu manajemen. Salah satu sistem pengawasan biaya produksi dilakukan melalui sistem akuntansi pertanggungjawaban.

Adanya pelimpahan wewenang mengharuskan adanya pertanggung jawaban bawahan kepada atasan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil, terutama terhadap elemen-elemen yang ada secara langsung berada dibawah pengendaliannya. Situasi ini mendorong pembentukan suatu sistem akuntansi yaitu Akuntansi Pertanggungjawaban. Dengan diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan menyebabkan terciptanya suatu pengendalian dan pengukuran prestasi kerja. Akuntansi pertanggungjawaban juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kemampuan setiap manajer, sehingga akan dibentuk landasan terciptanya suatu sistem pengukuran prestasi kerja (Hansen, 2017:8).

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan atau kantor. Dimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat menunjang tercapainya tujuan suatu perusahaan dan akuntansi pertanggungjawaban juga memiliki peran yang penting dalam menilai prestasi manajemen terutama dilihat dari kinerja para manajer yang berada disetiap pusat pertanggungjawaban tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

### **Penerapan Sistem Akuntansi (Implementasi)**

Implementasi adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun (KBBI, 2019:12).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2018).

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2017:23), memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Ardana dan Hendro, (2016:21), sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan dan data non keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi, (2018:9) menyatakan, Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga terbagi dalam lima subsistem, yaitu :

1. Sistem pengeluaran (expenditure system). Adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan usaha mendapatkan sumber – sumber ekonomis yang diperlukan perusahaan.
2. Sistem pendapatan (revenue system). Adalah sistem informasi akuntansi yang berhubungan

dengan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumen dan mendapatkan pembayaran dari mereka.

3. Sistem produksi (production system). Adalah sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan proses mengumpulkan, menggunakan, dan merubah bentuk suatu sumber ekonomi
4. Sistem manajemen sumber daya (resources management system). Adalah sistem informasi akuntansi yang meliputi berbagai hal yang berkenaan dengan manajemen dan pengendalian sumber daya.
5. Sistem buku besar dan laporan keuangan (general ledger and financial accounting). Adalah sistem informasi yang meliputi proses pengolahan bukti-bukti keuangan dan laporan keuangan yang mewakili status financial perusahaan.

### **Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan (Mulyadi, 2018:9). Sedangkan menurut Anthony & Govindarajan (2018:11), akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari sistem pengontrolan akuntansi yang merupakan salah satu faktor yang nantinya akan mendukung implementasi strategi, dimana strategi tersebut merupakan rencana pencapaian tujuan organisasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Sekaran (2018:32) penelitian deskriptif dilakukan untuk dapat mengetahui dan mampu menjelaskan karakteristik variabel yang akan diteliti dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, dan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendekatan kuantitatif lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik, bukan makna secara kebahasaannya.

Penelitian yang dilakukan untuk meneliti penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada di Kantor Camat Ilir Talo Kabupaten Seluma. Untuk mendapatkan data mengenai akuntansi pertanggungjawaban, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya penulis mengolah data yang diperoleh dengan menganalisis sesuai dengan teori yang ada dan diberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Perbandingan Akuntansi Pertanggungjawaban Mulyadi dengan Kantor Camat Ilir Talo**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Kantor Camat Ilir Talo Kabupaten Seluma, berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban yang ada ternyata hanya beberapa item saja yang dilakukan. Oleh sebab itu karena siklus akuntansi pertanggungjawabannya kurang lengkap sehingga tidak dapat dibandingkan sesuai atau tidak sesuai dengan Kantor Camat Ilir Talo, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1 Hasil Perbandingan Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Mulyadi dengan Kantor Camat Ilir Talo**

No	Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Mulyadi	Kantor Camat	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Penetapan Tanggung Jawab - Pendelegasian tanggungjawab dari pimpinan - Pemberian Wewenang kepada para pegawai	- Dilakukan delegasi tanggungjawab dari pimpinan sesuai Tupoksi - Tidak ada pemberian wewenang	- Sesuai - Tidak Sesuai
2	Penentuan Ukuran Kinerja - Standar penentuan ukuran kinerja terhadap pelayanan yang dilakukan	- Tidak ada standar penentuan kinerja terhadap pelayanan yang dilakukan	- Tidak Sesuai
3	Penilaian Kinerja - Pengukuran kinerja pegawai berdasarkan waktu, kualitas, dan efisiensi - Evaluasi hasil kinerja pegawai	- Ada pengukuran kinerja berdasarkan waktu, kualitas dan efisiensi - Ada evaluasi hasil kinerja	- Sesuai - Sesuai
4	Pemberian penghargaan - Pemberian penghargaan kepada setiap kelompok unit kerja seperti memberikan pujian - Pemberian surat penghargaan kepada pegawai berprestasi	- Tidak ada - Tidak ada	- Tidak Sesuai - Tidak Sesuai

Sumber : Data diolah, 2023

1. Penetapan tanggungjawab adalah pendelegasian tanggung jawab dan pemberian wewenang untuk memberikan kesempatan pegawai untuk merumuskan sasaran mereka sendiri dan membuat keputusan dalam rangka tanggungjawab yang didelegasikan kepada mereka. Penetapan tanggungjawab yang terstruktur dapat mendorong tingkat kerjasama antara pegawai.
2. Penentuan Ukuran Kinerja adalah standar ukuran kinerja sebuah pegawai unit organisasi dalam akuntansi pertanggungjawaban yang ditetapkan cenderung tidak akan berubah sepanjang tahun dan akan dijadikan acuan yang harus dicapai selama standar tersebut masih ditetapkan.
3. Penilaian Kinerja adalah penilaian kinerja yang dilakukan Pengukuran kinerja pegawai berdasarkan waktu, kualitas, dan efisiensi dan evaluasi hasil kinerja pegawai. Pelaksanaan penilaian kinerja mampu menghasilkan laporan perkembangan organisasi dan kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalamnya.
4. Pemberian Penghargaan adalah pemberian penghargaan kepada setiap kelompok unit kerja seperti memberikan pujian dan surat penghargaan kepada pegawai berprestasi. Pemberian penghargaan dapat memberikan motivasi bagi pegawai untuk lebih giat dalam meningkatkan kinerja.

## Pembahasan

### Penetapan Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil penelitian tentang penetapan tanggung jawab, ternyata Kantor Camat Ilir Talo belum seluruhnya sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2018). Kantor Camat Ilir Talo hanya menerapkan delegasi tanggung jawab dari pimpinan sesuai tupoksi tetapi belum menerapkan pemberian wewenang kepada pegawai untuk merumuskan sasaran mereka sendiri dan membuat keputusan secara mandiri dalam rangka tanggungjawab yang telah didelegasikan kepada mereka khususnya pada pelayanan KTP, surat pengantar BPJS, surat keterangan tidak mampu dan surat pengantar SKCK ke Polres yang dilakukan di Kantor Camat Ilir Talo. Berdasarkan hasil wawancara penetapan tanggungjawab di Kantor Camat Ilir Talo dilakukan oleh Camat dan Sekcam. Menurut Hasibuan (2018:9), organisasi melaksanakan penetapan tanggungjawab serta pendelegasian wewenang kepada para pegawai untuk memastikan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Bawang, 2023), bahwa Pintar Asia Swalayan Maumere belum sepenuhnya menerapkan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban karena dalam proses penyusunan anggaran biaya belum melibatkan semua unit yang ada dalam perusahaan tersebut dan belum ada pemisahan biaya antara biaya terkendali dan tidak terkendali.

### Penentuan Ukuran Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penentuan ukuran kinerja, ternyata Kantor Camat Ilir

Talo belum sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi. Berdasarkan temuan dilapangan Kantor Camat Ilir Talo tidak menerapkan tandar penentuan kinerja dalam memberikan pelayanan KTP, surat pengantar BPJS, surat keterangan tidak mampu dan surat pengantar SKCK ke Polres yang dilakukan di Kantor Camat Ilir Talo. Menurut Wibowo (2018:9) standar kinerja merupakan pernyataan tentang bagaimana situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan dilakukan secara efektif. Standar kinerja berkaitan dengan gambaran yang dilakukan oleh pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Abdullah (2019:5), bawa standar kinerja merupakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu rganiasi, dan merupakan sebuah tujuan atau target tergantung pada pendekatan yang diambil. Standar kinerja yang baik harus realistis, dapat diukur dan mudah dipahami dengan jelas sehingga bermanfaat baik bagi organisasi maupun para pegawai.

## Penilaian Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penilaian kinerja, ternyata Kantor Camat Ilir Talo sudah sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2018). Berdasarkan hasil wawancara Kantor Camat Ilir Talo telah menerapkan pengukuran kinerja berdasarkan waktu, kualitas dan efisiensi serta melakukan evaluasi hasil kinerja yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan KTP, surat pengantar BPJS, surat keterangan tidak mampu dan surat pengantar SKCK ke Polres yang dilakukan di Kantor Camat Ilir Talo. Berdasarkan hasil wawancara yang melakukan penilaian kinerja adalah Sekcam dan Kasubag kepegawaian.

Menurut Mulyadi (2018:9), mengungkapkan bahwa penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional dari suatu organisasi, bagian organisasi, dan pegawai yang ada di dalamnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasna (2029), yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban dapat dikatakan cukup baik. Perusahaan sebaiknya melakukan pengidentifikasian jenis pusat pertanggungjawaban untuk mempermudah penilaian kinerja para manajer.

## Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan, ternyata Kantor Camat Ilir Talo belum sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2018). Berdasarkan hasil wawancara tidak ada penelrapan pemberian penghargaan kepada setiap kelompok unit kerja seperti memberikan pujian ataupun pemberian surat penghargaan kepada pegawai berprestasi dalam memberikan pelayanan KTP, surat pengantar BPJS, surat keterangan tidak mampu dan surat pengantar SKCK ke Polres yang dilakukan di Kantor Camat Ilir Talo.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Mulyadi, 2018:9), bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional didesain untuk mendorong pimpinan agar dapat mengelola pekerjaan dengan baik. Apabila kinerja pegawai baik diberikan penghargaan, begitupun sebaliknya. Manajer pusat pertanggungjawaban dan para pegawai yang dapat mencapai target sasaran organisasi dengan baik, maka akan diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas Kantor Camat Ilir Talo telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban namun secara keseluruhan belum sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban Mulyadi (2018), hanya ada beberapa item saja yang sudah sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu pemberian delegasi dan penilaian kinerja pegawai, sedangkan indikator yang lainnya belum diterapkan di Kantor Camat Ilir Talo.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kantor Camat Ilir Talo belum menerapkan keseluruhan akuntansi pertanggungjawaban yang sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban Mulyadi (2018) karena kurangnya pemahaman

tentang akuntansi pertanggungjawaban, hanya ada beberapa item saja yang sesuai.

2. Hanya melakukan delegasi tanggung jawab dan penilaian kinerja bentuk akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan di Kantor Camat Ilir Talo .

### Saran

1. Untuk kegiatan pelayanan KTP, surat pengantar BPJS, surat keterangan tidak mampu dan surat pengantar SKCK ke Polres berikutnya diharapkan Kantor Camat Ilir Talo Kabupaten Seluma agar menerapkan akuntansi pertanggungjawaban mulai dari Penetapan Tanggung Jawab, Penentuan Ukuran Kinerja, Penilaian Kinerja sampai Pemberian penghargaan sehingga sistem akuntansi pertanggungjawaban yang ada di kantor Camat dapat terlaksana dengan baik.
2. Dalam mengatasi permasalahan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pelayanan KTP, surat pengantar BPJS, surat keterangan tidak mampu dan surat pengantar SKCK ke Polres hendaknya dilakukan oleh pimpinan yang mengetahui dan memahami tentang sistem akuntansi pertanggungjawaban sehingga sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebaiknya dapat ikut melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan mengenai akuntansi pertanggungjawaban, sebagai bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi yang termasuk dalam pengabdian kepada Masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2019). Manajemen pemasaran (1 st ed). Depok: PT. Rajagrafindo Persad.
- Anthony & Govindarajan (2018). Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardana, Cenik dan Hendro Lukman. (2018). Sistem Informasi Akutansi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Asri, P. V, Indriana, I, Kemas, M, Thamrin, H. (2022). Pengaruh Budgetary Goal Characteristics Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10(2)
- Bawang, R.M, Herdi, H, Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Pintar Asia Swalayan Maumere. *Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2(3) 123-133
- Danny, E. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. *Jurnal Ecodemica* 2(1)
- Hansen, Mowen. (2017). Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap. (2018). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali.
- Hasibuan (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasna, D.L, Racman, R. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada PT. Taspem (Persero) KC Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 8(1)
- Lubis, I, A. (2017). Akuntansi Keperilakuan : Akuntansi Multiparadigma. Jakarta : Salemba Empat
- Mulyadi. (2017). Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi. (2018). Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Yogyakarta: BPFE
- Nugroho, R. (2018). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins (2017). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Samryn, L. M. (2019). Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, Uma. (2018). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta; Salemba Empat.
- Subarsono, A. G. (2017). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Torina, E. G, susanti, N, Hidayah, N. R. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10 89-98
- Wibowo. (2018). Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Press.